

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Tangguh Bencana Melalui Kolaborasi dan Manajemen Pariwisata Kebencanaan Terintegrasi

*Mahardhika Berliandaldo¹, Ari Prasetyo², Viky Pemuda Indra Sakti³

¹⁻³ Direktorat Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Indonesia, email: berli.parekraf@gmail.com



Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel</p> <p>Diterima : 1 Januari 2023</p> <p>Revisi : 7 Januari 2023</p> <p>Dipublikasikan : 15 Januari 2023</p> <p>Kata kunci:</p> <p>Ketahanan Pariwisata</p> <p>Bencana</p> <p>Kolaborasi</p> <p>Sinergi dan Integrasi</p>	<p>Dalam satu dekade terakhir, Indonesia tidak pernah lepas dari ancaman bencana atau krisis yang memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata mengalami salah satu kerugian yang cukup besar dari adanya bencana atau krisis yang menimpa negara kita. Melalui pengembangan pariwisata tangguh dan aman terhadap bencana, penguatan kebijakan dan pelaksanaan kolaborasi akan mengintegrasikan dalam satu kerangka kerja manajemen pariwisata kebencanaan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata dan berkontribusi pada aspek sosial dan ekonomi. Artikel ini menggunakan pendekatan desk study dan deskriptif analitis. Penulis menemukan bahwa pengembangan pariwisata tangguh bencana harus dapat disinergikan dengan konteks manajemen bencana yakni tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, dan tahap pasca bencana yang dilaksanakan melalui skema penyelarasan kebijakan pariwisata dan manajemen bencana serta kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui lima tahap program yang bertujuan untuk memberikan langkah resolusi dan kolaborasi yang cepat dan tanggap dalam menangani pemulihan dan tindakan ketahanan jangka Panjang khususnya pada sektor pariwisata dengan Kerangka kerja manajemen pariwisata kebencanaan yang terintegrasi. Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari kajian ini diantaranya New Regulation yang mengatur secara spesifik pariwisata tangguh bencana, Kolaborasi yang intensif antar Kementerian/Lembaga, Sinergi program pariwisata dan manajemen bencana terhadap destinasi yang rentan bencana, dan realisasi integrasi kebijakan pariwisata dan bencana.</p>
<p>Keywords:</p> <p>Resilience Tourism</p> <p>Disasters</p> <p>Collaboration</p> <p>Synergy and Integration</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>The development of disaster-resilient and disaster-safe tourism policies, policy strengthening and implementation of collaboration will be integrated into one disaster tourism management framework. In the past decade, Indonesia has never been separated from the threat of disasters or crises that hurt Indonesia's economic growth. Tourism suffers considerable losses from a tragedy or crisis that befell our country. Through the development of resilient and disaster-safe tourism, policy strengthening and collaboration implementation will integrate into one disaster tourism management framework aimed at strengthening the tourism sector's resilience and contributing to social and economic aspects. This article uses desk study and descriptive-analytical approaches. The author finds that the development of disaster-resilient tourism must be synergized with the context of disaster management, namely the pre-disaster stage, when a disaster occurs, and the post-disaster step, which is implemented through an alignment scheme for tourism policy and disaster management as well as collaboration between stakeholders through five stages of the program which aims to provide quick and responsive resolution and collaboration steps in dealing with recovery and long-term resilience</i></p>



actions, especially in the tourism sector with an integrated disaster tourism management framework. Some of the recommendations from this study include the New Regulation, which explicitly regulates disaster-resilient tourism, the intensive collaboration between ministries/institutions, the synergy of tourism programs and disaster management for disaster-prone destinations, and the realization of integration of tourism and disaster policies.

Pendahuluan

Pertumbuhan sektor pariwisata di berbagai negara menjadi industri primadona yang sangat bermanfaat bagi penguatan ekonomi yang berasal dari sektor tersebut. Dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, sektor pariwisata akan terus memberikan dampak positif bagi negara dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, yaitu sejumlah 603,20 juta perjalanan wisnus dan 1,56 juta kunjungan wisman pada tahun 2021 yang lalu (Kemenparekraf, 2022). Selain itu, Pariwisata Indonesia menjadi salah satu penghasil devisa utama (Aribowo et al., 2018) dan memiliki Pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia (Fairuuz et al., 2022; Mudrikah, 2014) dengan menyumbang devisa pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,52 Miliar USD (Kemenparekraf, 2022).

Namun demikian, kondisi pariwisata Indonesia dihadapi dengan berbagai permasalahan tersendiri, salah satunya adalah terkait lokasi atau keberadaan negara Indonesia yang berada di antara tiga lempeng bumi yang terus bergerak sehingga memiliki potensi terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, gunung meletus, topan, badai, dll (Demartoto, 2019). Selain bencana alam, sektor pariwisata juga dihadapi dengan peristiwa seperti bencana non alam (seperti kegagalan teknologi dan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit) serta bencana sosial (seperti konflik sosial antar kelompok dan aksi terorisme) (Wahyuni et al., 2021). Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam gempa bumi yang memiliki dampak lainnya seperti kerusakan rumah tinggal dan sarana prasarana umum, banyaknya korban jiwa, serta kehilangan harta benda (Liu-Lastres et al., 2020; Rosselló et al., 2020; Rusmiyati & Hikmawati, 2012). Selain itu, pada tahun 2020-2021 yang lalu Pariwisata Indonesia dihadapkan pada Bencana non alam, yakni wabah covid-19 yang meluluhlantahkan kondisi pariwisata nasional dan global (Collins-Kreiner & Ram, 2021; Gössling et al., 2021; Lily Dianasari, 2021; UNWTO, 2020a).

Berbagai bencana yang telah menimpa Indonesia menyebabkan kehancuran pada destinasi dan objek wisata yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kunjungan wisatawan, kerusakan sarana prasarana, hilangnya lapangan kerja, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan pasca terjadinya bencana, pelaku usaha masih merasa cemas, depresi, takut, dan trauma apabila terdapat bencana kembali yang serupa (Demartoto, 2019; Demeter et al., 2021). Selain itu juga, wisatawan akan menghindari lokasi-lokasi yang mengalami bencana alam maupun non alam (Fountain & Cradock-Henry, 2020; Rhama, 2022; Wahyuni et al., 2021), sehingga akan mengakibatkan dampak negatif terhadap ekonomi lokal maupun nasional. Dengan begitu, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan diantaranya UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana dan Perpres No. 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dengan upaya mitigasi dan pencegahan dalam rangka memperkuat ketahanan negara (Situmorang, 2022) dalam berbagai sektor khususnya sektor pariwisata.

Pembangunan pariwisata tangguh dan aman dari bencana merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kenyamanan, perlindungan, dan keselamatan kepada wisatawan dan masyarakat sekitar dari dampak buruk akibat bencana, melindungi investasi sektor/industri pariwisata termasuk ekonomi masyarakat sekitar kawasan pariwisata, dan mewujudkan sinergi arah kebijakan pengembangan kepariwisataan di kawasan/destinasi wisata rawan bencana (Nugroho, 2022). Melalui strategi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan pariwisata tangguh bencana dilaksanakan dengan langkah kolaborasi antar stakeholders (Abdeen et al., 2021; Nugroho, 2022; Waligo et al., 2013; World Bank, 2020) dan pengembangan kerangka kerja manajemen pariwisata kebencanaan yang terintegrasi (Agustan & Kausar, 2019; Estevão & Costa, 2020; Niyaz, 2015) agar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggabungan kedua konsep atau model

dalam membangun pariwisata aman bencana, belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, Sehingga melalui hasil kajian ini, kedepannya dalam pembangunan pariwisata yang memiliki ketahanan terhadap bencana dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan jenis serta dampak bencana dan juga kebijakan pariwisata Tangguh dan aman dari bencana, skema kolaborasi pengembangan pariwisata Tangguh bencana, dan implikasi manajemen pariwisata kebencanaan yang terintegrasi dalam rangka memberikan ketahanan sektor pariwisata.

Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan desk study (Creswell, J. W., & Creswell, 2018). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Buku, Jurnal, Laporan, Peraturan, Data Statistik, serta berbagai artikel dari internet yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis (Sugiyono, 2017) yang digunakan untuk mengelaborasi kebijakan pariwisata tangguh bencana dengan kolaborasi melalui pengaturan peran para pemangku kepentingan (Nugroho, 2022; World Bank, 2020).

Hasil Analisis tersebut lebih lanjut digunakan untuk mengetahui implikasi atas pengembangan manajemen pariwisata tangguh bencana secara terintegrasi melalui pengembangan kerangka kerja terpadu (Agustan & Kausar, 2019; Estevão & Costa, 2020; Niyaz, 2015) untuk Menyusun strategi dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan pariwisata tangguh bencana.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pariwisata Tangguh Bencana

Industri pariwisata Indonesia masih menjadi primadona ditengah banyaknya bencana yang menimpa hampir seluruh daerah, hal ini berdasarkan data geologi negara Indonesia yang terletak dalam circle of fire (lingkaran api) yang mengakibatkan negara Indonesia menjadi negara yang rawan bencana (Situmorang, 2022). Selain itu juga, dunia baru-baru ini mengalami situasi pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata (Syaifudin et al., 2022; UNWTO, 2020b) dan memberikan tantangan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta mengakibatkan penurunan wisatawan mancanegara sejumlah 60-80% (Harchandani & Shome, 2021; UNWTO, 2022). Dengan adanya berbagai dampak yang terjadi pada sektor pariwisata, maka akan mengakibatkan banyak yang kehilangan pendapatan dari sektor tersebut (ILO, 2020), karena bisnis pariwisata telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dari yang bersifat konvensional hingga modern (Hall et al., 2020). Bisnis pariwisata membutuhkan banyak dukungan, seperti akomodasi (hotel, apartemen, pondok permainan, rumah tebak), layanan perjalanan (darat, laut, dan udara), restoran, kafe, layanan katering, tempat hiburan, layanan keamanan dan perbankan, layanan periklanan, layanan pemandu wisata dan pendidikan, dan Lain-lain (Gössling et al., 2021; Vivian, 2011).

Pariwisata Indonesia sangat rentan terhadap bencana jika tidak dapat dikelola dengan baik yang mengakibatkan Pengaruh terhadap ekosistem pariwisata dan pencapaian target sektor pariwisata seperti jumlah wisatawan, devisa, tenaga kerja, dan lainnya. Bencana yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan Pengaruh terhadap tinggi rendahnya pencapaian target kinerja tersebut. Untuk meminimalkan resiko bencana, dapat dilakukan mitigasi bencana (Wicaksono & Pangestuti, 2019)

Tabel 1. Jenis dan Dampak Bencana terhadap Sektor Pariwisata Indonesia dari Tahun 2010 – 2021

No.	Jenis Bencana	Dampak Sektor Pariwisata
1.	Erupsi Gunung Merapi tahun 2010	Memiliki dampak terkait penurunan jumlah kunjungan wisatawan di beberapa obyek wisata pada daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mencapai 65amper 50 persen.
2.	Bencana kebakaran hutan dan lahan pada Agustus hingga September 2015	Mengakibatkan 13 bandara tidak bisa beroperasi karena jarak pandang pendek dan membahayakan penerbangan, sehingga beberapa bandara harus tutup dan event internasional mengalami penundaan dan berdampak besar terhadap sektor pariwisata seperti hotel, restoran, industri penerbangan, layanan perjalanan, objek wisata, dll.
3.	Erupsi Gunung Agung di Bali tahun 2017	Memiliki dampak besar terhadap jumlah wisatawan yang mengalami penurunan sejumlah 1 juta wisatawan dan memberikan kerugian sebesar Rp. 11 Triliyun khususnya pada sektor pariwisata.
4.	Gempa Lombok yang beruntun pada tahun 2018	Mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan sebanyak 100.000 dan menyebabkan kerugian ekonomis sejumlah Rp. 1,4 Triliyun.
5.	Gempa Palu sebesar 7,4 magnitudo disertai tsunami	Mengakibatkan pembatalan terkait event nasional besar sehingga berdampak pada penurunan jumlah wisatawan ke daerah tersebut.
6.	Tsunami di Selat Sunda pada 22/12/2018	Dampak yang terjadi memiliki multiplier effect seperti pembatalan kunjungan wisatawan, turunnya tingkat okupansi hotel dan penginapan mencapai 80-90% khususnya dikawasan wisata Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung
7.	Wabah Covid-19 pada 2020 & 2021	Mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan kontribusi devisa sektor pariwisata serta penurunan pergerakan wisatawan nusantara. Selain itu, dampak yang ditimbulkan lainnya yaitu meruginya beberapa destinasi wisata seperti EO, WO, Catering, Rumah Makan dan rstoran, Perhotelan dan akomodasi lainnya, took oleh-oleh dan cinderamata, industri transportasi, beberapa objek wisata dipaksa tutup hingga waktu yang belum jelas, dll, yang menimbulkan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah.

Sumber: Hasil analisis diolah dari (BNPB, 2019; Petriella, 2019; Rusmini, 2021)

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia telah memberikan kerugian bagi sektor pariwisata Indonesia mencapai angka Ratusan Triliun Rupiah. Program mitigasi dan pengurangan risiko bencana khususnya pada sektor pariwisata harus mampu diwujudkan dengan baik salah satunya melalui berbagai kebijakan yang dapat memperkuat sektor pariwisata dari ancaman bencana. Kebijakan terkait tangguh bencana masuk kedalam Visi pemerintah dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2022-2045 “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan” (Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044, n.d.). Tangguh bencana memiliki makna terkait mampu beradaptasi dan memulihkan diri dari adanya bencana serta perubahan iklim dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

Dalam kaitannya dengan pariwisata, Pengembangan destinasi pariwisata harus selaras dengan 4 (empat) konsep resiliensi berkelanjutan, yaitu memperkuat budaya siaga bencana yang antisipatif, responsive, dan adaptif; berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi serta ikut serta dalam program pendanaan dan transfer teknologi; Infrastruktur yang tangguh bencana terhadap Climate Change; dan komitmen bersama dalam implementasi kesepakatan global (Nugroho, 2022).

Tabel 2. Analisis terkait Kebijakan terkait Ketahanan Bencana pada Sektor Pariwisata

No.	Peraturan	Uraian Kebijakan
1.	UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdsarkan 4 (empat) aspek, meliputi Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah melalui 3 (tiga) tahap yakni tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan kolaborasi antar Lembaga nasional maupun internasional.
2.	UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan	Pemerintah diharapkan memberikan informasi terkait kondisi destinasi pariwisata yang kondusif dan aman agar dikunjungi oleh para wisatawan dengan memberikan peringatan dini terhadap adanya suatu bencana.

3. PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Pembangunan kepariwisataan nasional agar berdaya saing dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat, dilengkapi dengan pembangunan fasilitas umum khususnya fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (<i>early warning system</i>) di destinasi yang rawan bencana.
4. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Sesuai dengan Agenda Perubahan terkait pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, pengembangan pariwisata diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan pariwisata rendah karbon.
5. Perpres No. 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044	Meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi resiko bencana dalam jangka Panjang, melalui berbagai strategi kebijakan yaitu meliputi: Kebijakan penguatan peraturan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; Kebijakan peningkatan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan; Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana; dan kebijakan penguatan tata Kelola bencana yang professional, transparan, dan akuntabel.
6. Perpres No. 26 Tahun 2022 Tentang Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan	Merupakan upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan mulai dari tahap perencanaan maupun tataran kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya dalam rangka penanggulangan Bencana pada sektor pariwisata nasional.
7. Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi memiliki rencana-rencana pengurangan resiko, pengelolaan krisis, dan tanggap darurat yang sesuai dengan kondisi destinasi, melalui skema perencanaan yang telah dibuat dan dikembangkan sehingga dapat mengenali beragam resiko, termasuk bencana alam, terorisme, ancaman Kesehatan, pengurangan sumber daya dan hal-hal lainnya sesuai dengan keberadaan lokasi.

Sumber: Hasil analisis dilakukan oleh Tim Penulis

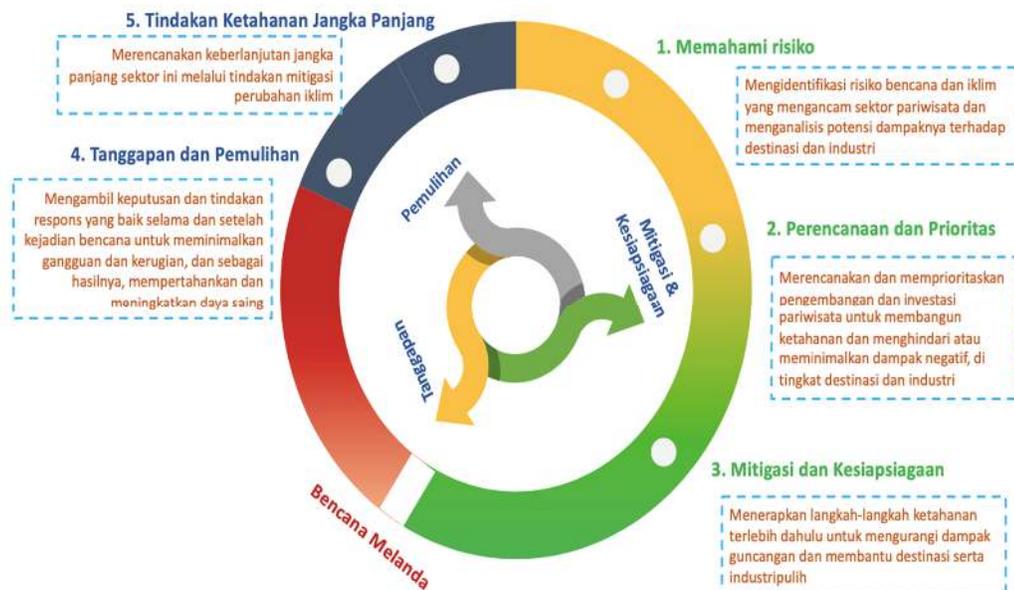
Berbagai kebijakan atas pembangunan pariwisata tangguh bencana tersebut merupakan salah satu Langkah mitigasi dan pengurangan risiko atas bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan adanya Langkah mitigasi terhadap bencana, sektor pariwisata Indonesia akan terus menjadi primadona karena memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan atas alamnya (berupa pantai, gunung, hutan, dan destinasi lainnya), serta keanekaragaman budaya yang dimiliki. Kebijakan yang telah disusun tersebut akan memberikan dampak positif terhadap target kinerja sektor pariwisata kedepan, sehingga hal tersebut harus mampu dilaksanakan secara kolaborasi dengan berbagai pihak agar Pariwisata Indonesia terus bangkit dan menjadi pendorong atas pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Tangguh Bencana

Pariwisata salah satu sektor yang memiliki efek domino terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak dapat berdiri secara sendiri dan harus ada keterlibatan berbagai stakeholders. Keterlibatan tersebut dapat berupa kolaborasi dan sinergi muti pihak dengan peran masing-masing yang terlibat didalamnya (Waligo et al., 2013). Kolaborasi pemangku kepentingan dikatakan sangat penting untuk keberhasilan destinasi pariwisata dan memahami hubungan antara pemangku kepentingan dapat membantu untuk memahami suatu tujuan, karakteristiknya dan bagaimana hal itu dikelola saat ini dan di masa depan (Hazra et al., 2017; Perkins et al., 2022; Rahu, 2021; Saito & Ruhanen, 2017). Oleh karena

itu, kolaborasi dalam membangun ketahanan terhadap bencana alam pada sektor pariwisata harus dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan (Abdeen et al., 2021).

Dalam kerangka pariwisata yang tangguh atas bencana diusulkan untuk memandu pemerintah, perusahaan, dan asosiasi industri dalam mengintegrasikan ketahanan ke dalam pengembangan pariwisata (World Bank, 2020). Kerangka kerja ini menjelaskan kategori atas langkah-langkah dalam meminimalkan kerugian dan gangguan serta memungkinkan pemulihan yang lebih kuat. Menurut World Bank, terdapat 5 langkah dalam membangun pariwisata Tangguh bencana yaitu Memahami risiko (*Understanding Risk*), Perencanaan dan Prioritas (*Planning & Prioritization*), Mitigasi dan Kesiapsiagaan (*Mitigation and Preparedness*), Tanggapan dan Pemulihan (*Response and Recovery*), dan Tindakan Ketahanan Jangka Panjang (*Long-Term Resilience Actions*). Tindakan ini dapat memberikan ketahanan, memperkuat daya saing, dan merangsang inovasi, investasi, penghematan biaya, serta reputasi. Mereka juga menciptakan manfaat bersama bagi lingkungan yang lebih luas, seperti mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca, serta berkontribusi pada ketahanan masyarakat dalam suatu tujuan.



Gambar 1. Siklus Pembangunan Ketahanan Pariwisata
Sumber: Modifikasi dari (World Bank, 2020)

Melalui siklus diatas, pembangunan pariwisata tangguh bencana atau ketahanan pariwisata sejalan dengan konteks manajemen bencana, yakni tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, dan tahap pasca bencana (Pahleviannur et al., 2019; Wicaksono & Pangestuti, 2019). Langkah-langkah tersebut telah diatur dalam kebijakan penanggulangan bencana, serta selaras dengan kepentingan dari berbagai stakeholders seperti Pemerintah, bisnis, Lembaga pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi dalam pengembangan ketahanan pariwisata harus mendukung tujuan inovasi Bersama dengan berkontribusi pada peningkatan atau penguatan sosial dan ekonomi (Aribowo et al., 2018; Halibas et al., 2017). Pembangunan pariwisata yang Tangguh dan memiliki ketahanan terhadap bencana harus dilakukan berdasarkan kerangka kerja kolaborasi yang bertujuan untuk menangkap tindakan ketahanan agar dapat terimplementasi dalam berbagai tujuan yang diinginkan (World Bank, 2020). Tindakan-tindakan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tabel dibawah ini menggambarkan pemangku kepentingan utama yang dapat berperan dalam setiap Tindakan dan ukuran ketahanan pariwisata.

Tabel 3. Pengaturan Stakeholders dalam kerangka kerja Kolaborasi Pariwisata Tangguh Bencana

Deskripsi	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Industri Pariwisata	Komunitas	Wisatawan	Mitra Pembangunan	Lembaga Keuangan
1. Memahami Risiko Pariwisata							
Mengintegrasikan pariwisata ke dalam penilaian risiko bencana dan iklim nasional	Utama	X				X	
Menilai risiko fisik dan keuangan dari bencana dan perubahan iklim ke destinasi dan industri	Utama	Utama	X				X
2. Perencanaan & Prioritas							
Mengintegrasikan pertimbangan risiko bencana dan iklim ke dalam kebijakan pariwisata dan perencanaan investasi sebagai strategi daya saing inti	Utama	Utama	X				
Menanamkan pariwisata dalam perencanaan penanggulangan bencana nasional dan lokal	Utama	Utama	X	X	X		
Menanamkan konsep pariwisata yang menjaga kelestarian lingkungan	Utama	Utama	Utama	X	X		
Menerapkan kelangsungan bisnis dan perencanaan bencana untuk destinasi dan industri	Utama	Utama	X	X	X	X	X
3. Mitigasi dan Kesiapsiagaan							
Menerapkan sistem peringatan dini dan komunikasi yang disesuaikan dengan pariwisata	Utama	Utama	X	X	X		
Mempromosikan aset dan infrastruktur pariwisata yang tahan iklim dan	Utama	Utama	Utama			X	X

bencana, termasuk solusi berbasis alam

Menetapkan mekanisme yang telah diatur sebelumnya untuk respons fisik dan keuangan yang terkoordinasi	Utama	Utama	X	X	X		
---	-------	-------	---	---	---	--	--

4. Tanggapan dan Pemulihan

Memitigasi risiko reputasi melalui strategi komunikasi dan pemasaran	Utama	Utama	X				
Melindungi dan memulihkan aset, pekerjaan, dan Bisnis pariwisata melalui paket stimulus	Utama	Utama					X
Memungkinkan dukungan teknologi untuk pemulihan infrastruktur dan aset pariwisata	Utama	Utama	X				X
Memberikan program dukungan yang ditargetkan untuk kelompok rentan, termasuk bisnis milik perempuan, wiraswasta atau pekerja informal, dan UKM	Utama	Utama					X

5. Tindakan Ketahanan Jangka Panjang

Mengurangi dampak iklim	X	X	X	X	X	X	X
Menerapkan pariwisata yang rendah karbon	Utama	Utama	Utama	X	X	X	
Mengimplementasikan efisiensi energi dalam industri pariwisata	X	X	Utama	X		X	X

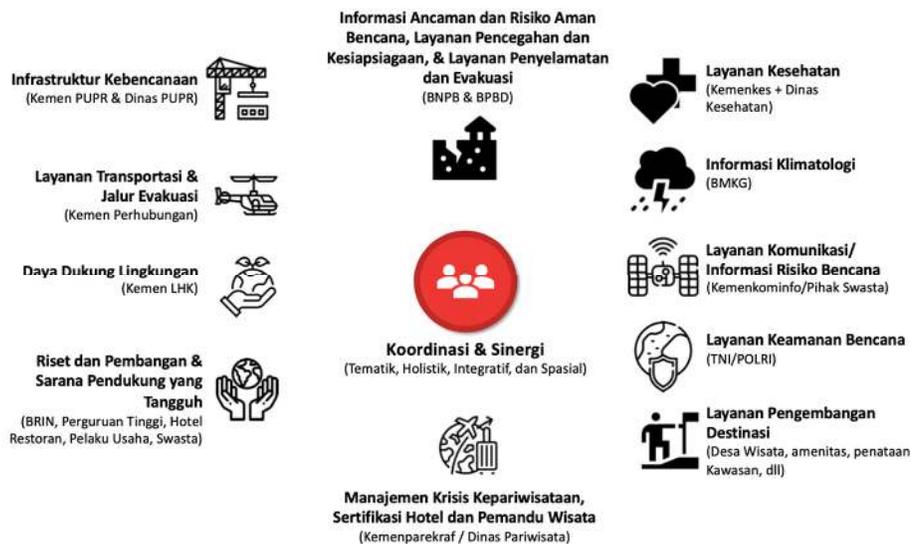
Sumber: Hasil analisis diolah dari (World Bank, 2020) dan tim penulis

Kolaborasi dilakukan pada tahap awal yakni memahami risiko untuk sektor pariwisata. Melalui tahap ini, skema kolaborasi dilakukan melalui dua cara yakni mengintegrasikan pariwisata pada risiko bencana dan menilai risiko fisik dan keuangan yang berasal dari bencana. Peran dari pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting karena perhitungan resiko bencana harus menggunakan pendekatan yang komprehensif dan memenuhi standar internasional yang menggabungkan tiga elemen, yaitu bahaya, paparan, dan kerentanan. Mengintegrasikan skenario perubahan iklim dan adaptasi ke dalam

penilaian risiko dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang risiko majemuk, terutama dalam jangka panjang. Jika dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pemangku kepentingan utama dari hotel nasional, operator tur, dan asosiasi industri lainnya, penilaian risiko dapat menyediakan platform untuk melibatkan sektor swasta, meningkatkan kesadaran mereka, dan tindakan kesiapsiagaan yang cepat (UNDRR, 2017).

Pelaksanaan kolaborasi terkait unsur perencanaan dan penentuan skala prioritas dilaksanakan oleh seluruh elemen pemangku kepentingan, khususnya pada penerapan kelangsungan bisnis dan perencanaan bencana untuk destinasi dan industri. Selain itu juga, penerapan prioritas program untuk saat ini dalam menghadapi bencana, sektor pariwisata harus dapat menjaga kelestarian lingkungan, hal ini akan membantu dalam mitigasi risiko terhadap bencana yang akan datang dikemudian hari. Pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan harus dilaksanakan secara kolaborasi (Shmueli et al., 2021) melalui skema yang terintegrasi antar pemangku kepentingan. Skema tersebut akan membantu dalam proses pemulihan pasca adanya bencana sehingga para pemangku kepentingan yang terlibat bertanggung jawab sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Berbagai sistem informasi dan komunikasi sangat penting untuk persiapan dan respons bencana. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini yang menyediakan informasi risiko sangat penting, dan informasi tersebut harus mampu menjangkau wisatawan dengan berbagai Bahasa (Handler, 2016). Layanan prakiraan cuaca berperan terhadap ketahanan bencana dan peningkatan efisiensi ekonomi dengan prakiraan cuaca digunakan untuk merumuskan kampanye pemasaran di pasar pariwisata yang ditargetkan serta untuk perencanaan pariwisata lokal (WTO, 2019). Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam Langkah kolaborasi pengembangan pariwisata tangguh bencana dengan tataran dalam sinergi multipihak (Nugroho, 2022).



Gambar 3. Sinergi Multipihak Pariwisata Tangguh Bencana
 Sumber: Hasil analisis diolah dari (Nugroho, 2022)

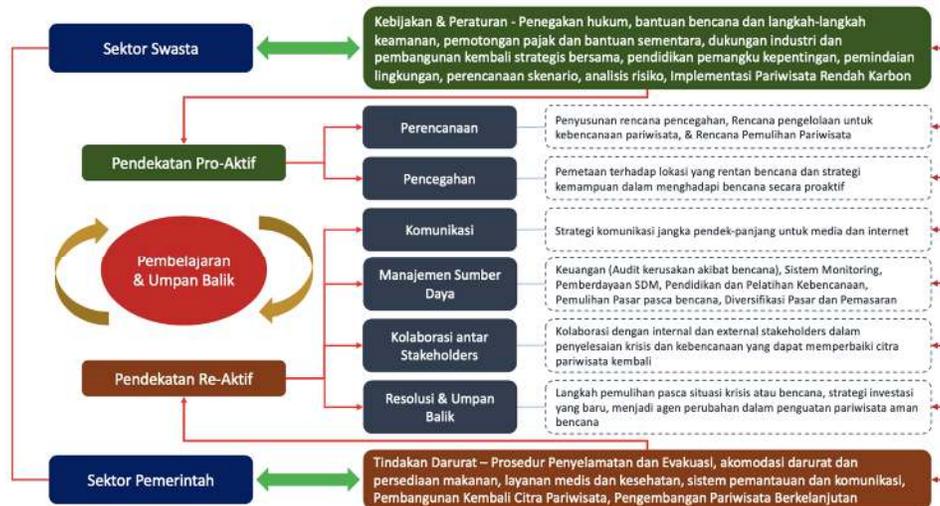
Sistem koordinasi, komunikasi, dan respons yang telah diatur sebelumnya memungkinkan pemangku kepentingan untuk bertindak cepat dalam menghadapi bencana. Tanggung jawab setelah bencana harus dialokasikan dengan jelas antara otoritas darurat lokal dan entitas sektor pariwisata. Tindakan mendesak dapat melibatkan evakuasi dan penampungan wisatawan, berkoordinasi dengan otoritas lokal, menyebarkan informasi kepada industri dan pers, mengatur langkah-langkah bantuan, dan memungkinkan bisnis untuk mengakses sumber daya fisik dan keuangan yang diperlukan untuk kelangsungan dan tanggapan. Liputan media yang negatif atau tidak akurat dapat meningkatkan pembatalan atau penundaan perjalanan dan menunda pemulihan pariwisata, maka dari itu dibutuhkan Langkah untuk meminimalisir berita-berita yang akan berhubungan dengan sektor pariwisata.

Pemerintah dan industri pariwisata dapat secara proaktif menyebarkan pesan positif untuk memulihkan kepercayaan wisatawan (Avraham, 2016), membuka jalan bagi pariwisata untuk kembali setelah tujuan siap (Wan et al., 2022).

Pemerintah dan para pelaku bisnis pariwisata telah berkomitmen untuk dekarbonisasi pariwisata (Gössling et al., 2022; Scott & Gössling, 2022), dengan penyeimbangan karbon menjadi ukuran yang paling umum (Sun & Higham, 2021). Para pemangku kepentingan semakin menyadari bahwa praktik tidak berkelanjutan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan memperburuk bahaya alam akan mempengaruhi daya saing industri. Sektor swasta mendorong banyak tindakan ini, sementara pemerintah menggunakan insentif, subsidi, dan kebijakan lain untuk mendukungnya. Wisatawan dan konsumen juga dapat memanfaatkan keputusan pembelian mereka untuk mendukung industri mengambil langkah-langkah ramah iklim.

Implikasi Manajemen Pariwisata Tangguh Bencana secara Terintegrasi

Krisis dan bencana menjadi lebih sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir (Jiang & Ritchie, 2017). Menurut (Hystad & Keller, 2008) hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan di dunia yang kompleks dan saling berhubungan sehingga memberikan dampak terhadap adanya bencana alam yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi khususnya pariwisata. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pariwisata secara global juga telah menyebabkan perluasan investasi pada sektor tersebut yang hanya mengejar factor keuntungan yang lebih besar tanpa melihat faktor lainnya (Paraskevas et al., 2013). Munculnya berbagai bencana memberikan dampak kehancuran ekonomi secara nasional sehingga membutuhkan kerangka kerja dalam pengelolaan pariwisata tangguh bencana secara terintegrasi. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan memberikan langkah resolusi dan kolaborasi yang cepat dan tanggap dalam menangani pemulihan dan Tindakan ketahanan jangka panjang khususnya pada sektor pariwisata.



. Gambar 4. Kerangka kerja Manajemen Pariwisata Kebencanaan yang Terintegrasi
 Sumber: Hasil diolah dari (Agustan & Kausar, 2019; Niyaz, 2015)

Kerangka kerja sebagaimana dimaksud, digunakan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun pariwisata aman bencana dan memiliki ketangguhan dalam menghadapi krisis dan bencana yang menimpa Indonesia. Dengan berlokasinya Indonesia pada *ring of fire*, maka menjadikan Indonesia berada pada kerentanan bencana sepanjang tahun. Pendekatan pro-aktif dan re-aktif digunakan untuk membangun pariwisata tangguh bencana sepanjang tahun. Pendekatan pro-aktif dan re-aktif digunakan untuk membangun pariwisata Tangguh bencana dimulai dari tahap perencanaan hingga resolusi dan umpan balik (Filimonau & De Coteau, 2019) sebagai Langkah pemulihan pariwisata pasca bencana. Strategi proaktif menggabungkan upaya persiapan dan mempromosikan pencegahan dan

kesadaran. Di antaranya kegiatan yang dilakukan untuk mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan bencana sebelum terjadi untuk meminimalisir dampak buruk. Contoh kegiatan tersebut dapat meliputi Rencana manajemen bencana tertulis berdasarkan skenario terburuk untuk manajemen krisis, pendekatan terkoordinasi antara organisasi sektor swasta dan publik, prosedur reguler untuk pelatihan staf dan partisipasi staf serta keterlibatan dalam pengembangan, implementasi dan revisi rencana tindak lanjut. Strategi reaktif mengintegrasikan empat aspek: (a) komunikasi krisis, (b) pengelolaan sumber daya, (c) kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan, (d) resolusi.

Upaya harus dilakukan untuk mengembangkan strategi penanggulangan untuk peristiwa bencana atau krisis, terutama ketika bentuk-bentuk krisis dan bencana tertentu kemungkinan akan terjadi atau berulang dari waktu ke waktu (Niyaz, 2015). Industri pariwisata telah mengalami banyak bencana dan krisis selama periode perencanaan, yang menunjukkan bahwa mereka harus siap menghadapi bencana berikutnya. Perencanaan merupakan tahap awal dalam Langkah manajemen pariwisata kebencanaan terpadu (Ritchie, 2009). Menurut (Agustan & Kausar, 2019) tahap ini dilakukan melalui Penyusunan rencana pencegahan, Rencana pengelolaan untuk kebencanaan pariwisata, & Rencana Pemulihan Pariwisata. Perencanaan dalam kerangka kerja ini bertujuan untuk menyusun rentang kendali agar mampu memberikan dampak positif pada pariwisata pasca bencana (Bello et al., 2021). Selain itu juga, tahap ini akan memberikan masukan pada proses umpan balik dari tahap-tahap yang akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah dan stakeholders lainnya harus mampu memetakan lokasi yang rentan terhadap bencana. Pemetaan tersebut akan digunakan sebagai Langkah awal dalam melakukan pembangunan sektor pariwisata di masa depan (ILO, 2022), hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang terjadi jika adanya bencana atau krisis. Selanjutnya, perlu dibangun strategi komunikasi jangka pendek dan Panjang pada media sosial dan internet untuk membangun informasi positif agar memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan pariwisata. Langkah ini merupakan strategi yang paling sesuai dalam membangun komunikasi antara destinasi pariwisata dengan wisatawan. Segala informasi harus dapat dikemas dengan baik yang dikombinasikan dengan manajemen sumber daya pada pariwisata Tangguh bencana agar memberikan hasil positif bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia.

Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat fundamental dalam manajemen kebencanaan dan krisis pada sektor pariwisata (Niyaz, 2015; Ritchie, 2009). Kolaborasi tersebut dirancang yang mencakup pemerintah, pesaing, rantai bisnis nasional, turis, kelompok aktivis, penduduk, bisnis lokal, dan karyawan (Saito & Ruhanen, 2017). Perspektif dalam kolaborasi ini untuk mengintegrasikan komponen dalam kerangka kerja manajemen bencana pariwisata. Dengan model tersebut, dialokasikan tugas yang berbeda untuk setiap pemangku kepentingan pariwisata selama periode pra-bencana, bencana, dan pascabencana (Niyaz, 2015). Kolaborasi antar pemangku kepentingan akan membuat perbedaan yang signifikan ketika bereaksi terhadap bencana.

Langkah kolaborasi tersebut menjadi suatu strategi dalam resolusi dan umpan balik untuk program pemulihan pasca situasi krisis atau bencana. Tahap resolusi dan umpan balik sesuai dengan pemulihan dan resolusi jangka panjang. Kondisi pariwisata Indonesia tidak mungkin untuk kembali ke situasi sebelum krisis, namun pembangunan kembali, rehabilitasi, dan pembukaan kembali infrastruktur dan layanan pariwisata menjadi penting seperti halnya pemulihan industri dan destinasi menuju keadaan yang lebih baik. Pada tahap ini pembelajaran terkait adanya krisis dan

Bencana akan menggiring para pemangku kepentingan untuk dapat melakukan skema percepatan jika terdapat kondisi yang serupa dimasa mendatang. Penggabungan pembelajaran yang dipetik untuk krisis pariwisata yang ada atau baru dan konteks manajemen bencana adalah langkah kunci dalam tahap resolusi. Secara keseluruhan, kerangka kerja terintegrasi ini akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang Tangguh atas bencana melalui berbagai tahap seperti tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, dan tahap pasca bencana melalui skema kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan pendekatan pro-aktif dan pendekatan re-aktif.

Simpulan

Berbagai krisis/bencana seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial telah terjadi di Indonesia yang memberikan kerugian bagi sektor pariwisata yang mencapai angka ratusan triliun rupiah selama satu dekade terakhir seperti erupsi gunung berapi, bencana kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, serta wabah covid-19. Kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan telah diterbitkan dalam rangka mitigasi dan pencegahan bencana pada sektor pariwisata meliputi UU No. 24/2007; UU No. 10/2009; PP No. 50/2011; Perpres No. 18/2020; Perpres No. 87/2020; Perpres No. 26/2022; dan Permenparekraf No. 9/2021. Melalui kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud, Langkah strategis yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan Kolaborasi dengan pengaturan dan peran stakeholders dalam menghasilkan ketahanan pariwisata terhadap bencana atau krisis. Langkah kolaborasi tersebut dilaksanakan melalui 5 tahap, yaitu Memahami risiko (*Understanding Risk*), Perencanaan dan Prioritas (*Planning & Prioritization*), Mitigasi dan Kesiapsiagaan (*Mitigation and Preparedness*), Tanggapan dan Pemulihan (*Response and Recovery*), dan Tindakan Ketahanan Jangka Panjang (*Long-Term Resilience Actions*). Tahapan kolaborasi tersebut mendukung tujuan inovasi Bersama dengan kontribusi pada peningkatan atau penguatan sosial dan ekonomi nasional.

Kerangka kerja manajemen pariwisata kebencanaan yang terintegrasi digunakan untuk melihat Implikasi atas tataran kebijakan serta strategi kolaborasi dalam membangun pariwisata aman bencana. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan Langkah resolusi dan kolaborasi yang cepat dan tanggap dalam menangani pemulihan dan Tindakan ketahanan jangka Panjang khususnya pada sektor pariwisata. Pembangunan kerangka kerja ini akan memberikan dampak positif dalam pengembangan pariwisata Tangguh bencana di masa depan, sehingga pariwisata Indonesia memiliki ketahanan atas bencana atau krisis yang akan menimpa negara Indonesia di kemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh, maka dapat disusun beberapa rekomendasi terkait pengembangan pariwisata tangguh bencana. Pada tataran kebijakan khususnya peraturan yang mengatur Pariwisata Tangguh atau aman terhadap bencana, belum ada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait pola atau konsep pengembangan pariwisata tangguh bencana. Untuk itu, perlu adanya pembahasan lebih detail terkait aturan dan kebijakan dalam pengembangan konsep pariwisata tersebut antar Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatas.

Model kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Tangguh bencana, harus dapat disinergikan antara program yang dimiliki Kementerian yang mengatur terkait Pariwisata dan Layanan pendukung lainnya dengan Program Lembaga yang menaungi kebencanaan. Hal tersebut bertujuan agar kolaborasi dari tahap perencanaan hingga umpan balik, dapat berjalan secara terorganisir dengan baik.

Pembangunan destinasi pariwisata yang rentan dengan bencana, kedepan harus dapat disinergikan dengan kebijakan atau program atau masukan dari Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan, sehingga akan membantu dalam meminimalisir kerugian jika dikemudian hari akan terjadi bencana besar. Pengintegrasian kebijakan pariwisata dalam program kebencanaan, harus segera direalisasikan agar mampu memberikan dampak positif bagi pariwisata Indonesia dimasa mendatang.

Referensi

- Abdeen, F. N., Fernando, T., Kulatunga, U., Hettige, S., & Ranasinghe, K. D. A. (2021). Challenges in multi-agency collaboration in disaster management: A Sri Lankan perspective. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 62, 102399. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102399>
- Agustan, A., & Kausar, D. R. K. (2019). Integrated Surveying for the Archaeological. *Geographia Technica*, 14(Special Issue), 39–50. <https://doi.org/10.21163/GT>
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>

- Avraham, E. (2016). Destination marketing and image repair during tourism crises: The case of Egypt. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 28, 41–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.04.004>
- Bello, O., Bustamante, A., & Pizarro, P. (2021). *Planning for disaster risk reduction within the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- BNPB. (2019). *Rentannya Pariwisata dari Bencana*. <https://Bnpb.Go.Id/Berita/Rentannya-Pariwisata-Dar>.
- Collins-Kreiner, N., & Ram, Y. (2021). National tourism strategies during the Covid-19 pandemic. *Annals of Tourism Research*, 89, 103076. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103076>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edit). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Demartoto, A. (2019). Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis Collaborative Governance. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.586>
- Demeter, C., Walters, G., & Mair, J. (2021). Identifying appropriate service recovery strategies in the event of a natural disaster. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 46, 405–413.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.01.015>
- Estevão, C., & Costa, C. (2020). Natural disaster management in tourist destinations: A systematic literature review. *European Journal of Tourism Research*, 25(2020), 1–17.
<https://doi.org/10.54055/ejtr.v25i.417>
- Fairuuz, N., Nofrian, F., & Desmintari, D. (2022). Peranan Jumlah Wisatawan Asing, Nilai Tukar, dan PMDN dalam Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(4), 694–707. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.570>
- Filimonau, V., & De Coteau, D. (2019). Tourism resilience in the context of integrated destination and disaster management (DM2). *International Journal of Tourism Research*, 22.
<https://doi.org/10.1002/jtr.2329>
- Fountain, J., & Cradock-Henry, N. A. (2020). Recovery, risk and resilience: Post-disaster tourism experiences in Kaikōura, New Zealand. *Tourism Management Perspectives*, 35, 100695.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100695>
- Gössling, S., Balas, M., Mayer, M., & Sun, Y.-Y. (2022). A review of tourism and climate change mitigation: The scales, scopes, stakeholders and strategies of carbon management. *Tourism Management*, 95(April 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104681>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An HEI perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.28945/3735>
- Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for. *Tourism Geographies*, 22(3), 577–598.
<https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759131>

- Handler, I. (2016). The impact of the Fukushima disaster on Japan's travel image: An exploratory study on Taiwanese travellers. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 27, 12–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.01.007>
- Harchandani, P., & Shome, S. (2021). The Effects of Covid-19 on Global Tourism. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 19(1), 63–83.
- Hazra, S., Fletcher, J., & Wilkes, K. (2017). An evaluation of power relationships among stakeholders in the tourism industry networks of Agra, India. *Current Issues in Tourism*, 20(3), 278–294. <https://doi.org/10.1080/13683500.2014.887662>
- Hystad, P. W., & Keller, P. C. (2008). Towards a destination tourism disaster management framework: Long-term lessons from a forest fire disaster. *Tourism Management*, 29(1), 151–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.02.017>
- ILO. (2020). *ILO Sectoral Brief: The impact of COVID-19 on the tourism sector*.
- ILO. (2022). *The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the COVID-19 pandemic*. Geneva: Sectoral Policies Department.
- Jiang, Y., & Ritchie, B. W. (2017). Disaster collaboration in tourism: Motives, impediments and success factors. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 31, 70–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.09.004>
- Kemenparekraf. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (Permenparekraf No. 11 Tahun 2022)*.
- Lily Dianasari, D. A. M. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Fisik Di Desa Wisata Di Bali. *Jurnal Kepariwisataaan*, 20(2), 99–106. <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i2.469>
- Liu-Lastres, B., Mariska, D., Tan, X., & Ying, T. (2020). Can post-disaster tourism development improve destination livelihoods? A case study of Aceh, Indonesia. *Journal of Destination Marketing & Management*, 18, 100510. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100510>
- Mudrikah, A. (2014). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia tahun 2004-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2).
- Niyaz, A. (2015). *Post Disaster Tourism Crisis Recovery in SIDS: Development and Testing of an Integrated Approach*. Lincoln University.
- Nugroho, P. C. (2022). *Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Aman Bencana*.
- Pahleviannur, M. R., Wulandari, D. A., Sochiba, S. L., & Santoso, R. R. (2019). Strategi Perencanaan Pengembangan Pariwisata Untuk Mewujudkan Destinasi Tangguh Bencana Di Wilayah Kepesisiran Drini Gunungkidul. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 116–126. <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.9692>
- Paraskevas, A., Altinay, L., McLean, J., & Cooper, C. (2013). Crisis knowledge in tourism: types, flows and governance. *Annals of Tourism Research*, 41, 130–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.12.005>
- Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044.
- Perkins, R., Khoo, C., & Arcodia, C. (2022). Stakeholder contribution to tourism collaboration:

- Exploring stakeholder typologies, networks and actions in the cluster formation process. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 52, 304–315.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.07.011>
- Petriella, Y. (2019). *Kerugian Sektor Pariwisata Akibat Bencana Alam Sepanjang 2018*.
<https://Infografik.Bisnis.Com/Read/20190122/547/881219/Ini-Kerugian-Sektor-Pariwisata-Akibat-Bencana-Alam-Sepanjang-2018>.
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 1–14.
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–24.
- Rhama, B. (2022). Local communities' and tourists' adaptation to pandemic-induced social disruption: Comparing national parks and urban destinations. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 82, 103380. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103380>
- Ritchie, B. W. (2009). *Crisis and disaster management for tourism*. Bristol: Channel View Publication.
- Rosselló, J., Becken, S., & Santana-Gallego, M. (2020). The effects of natural disasters on international tourism: A global analysis. *Tourism Management*, 79, 104080.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104080>
- Rusmini, A. (2021). Gambaran Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Destinasi dan Pariwisata di Indonesia. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 136–145.
- Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2012). Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana Merapi. *Sosio Informa*, 17(2), 97–110.
- Saito, H., & Ruhanen, L. (2017). Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 31, 189–196.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.01.001>
- Scott, D., & Gössling, S. (2022). A review of research into tourism and climate change - Launching the annals of tourism research curated collection on tourism and climate change. *Annals of Tourism Research*, 95(July 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103409>
- Shmueli, D. F., Ozawa, C. P., & Kaufman, S. (2021). Collaborative planning principles for disaster preparedness. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52, 101981.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101981>
- Situmorang, M. T. N. (2022). Pariwisata Berbasis Siaga Bencana Di Era Disrupsi (Tourism Based on Disaster Awareness in the Era of Disruption). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1(April), 1–6. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.7>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sun, Y.-Y., & Higham, J. (2021). Overcoming information asymmetry in tourism carbon management: The application of a new reporting architecture to Aotearoa New Zealand. *Tourism Management*, 83(April 2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104231>
- Syaifudin, A., Hendarmawan, & Novianti, E. (2022). Impact of COVID-19 on the Global Tourism Economy. *Journal of Tourism Education (JoTE)*, 2(1), 1–9.

- UNDRR. (2017). *Words into Action Guidelines: National Disaster Risk Assessment*. Geneva: UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).
- UNWTO. (2020a). *Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism*.
- UNWTO. (2020b). *World Tourism Barometer, Statistical Annex* (January 20).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18111/wtobarometereng>
- UNWTO. (2022). *International Tourism Back To 60% Of Pre-Pandemic Levels in January-July 2022*. Barometer.
- Vivian, T. C. (2011). *Tourism business growth with specific reference to black economic empowerment in the tour operating sub sector in South Africa*.
- Wahyuni, P. I., Muliawan, I. W., Rangan, P. R., Sahabuddin, A. A., Dana, G. W. P., Tumpu, M., Mabui, D. S. S., Mansyur, Kusuma, A., Kurniawan, A., & Sinarta, I. N. (2021). *Investasi Pariwisata Indonesia*. Makasar: Tohar Media.
- Waligo, V. M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework. *Tourism Management*, 36, 342–353.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008>
- Wan, Y. K. P., Li, X., Lau, V. M.-C., & Dioko, L. (Don). (2022). Destination governance in times of crisis and the role of public-private partnerships in tourism recovery from Covid-19: The case of Macao. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51, 218–228.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.012>
- Wicaksono, R. D., & Pangestuti, E. (2019). Analisis Mitigasi Bencana Dalam Meminimalisir Risiko Bencana. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 71(1), 8–17.
- World Bank. (2020). *Resilient Tourism: Competitiveness in the Face of Disasters*. Washington, DC: World Bank.
- WTO. (2019). *Country Research on Natural Disasters and Trade – Summary*. Geneva: WTO.